



Pemprov DKI Jakarta Peroleh 162 Sertifikat Tanah, Jakarta Pusat Jadi Kota Lengkap

d

TANAH merupakan harta yang penting, selain rumah dan kendaraan. Tak terkecuali bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambut baik penyerahan 162 sertifikat aset oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, di Balai Kota,

19 Mei 2023 lalu. Sertifikat bidang tanahnya mencakup luas 225 hektare, dengan nilai total aset mencapai Rp 29,35 triliun.

Rinciannya Jakarta Utara sebanyak 118 bidang, Jakarta Selatan 30 bidang, Jakarta Barat tiga bidang, serta Jakarta Timur sebelas bidang. Termasuk di dalamnya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kampung Bermis Muara Angke, HPL National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Kelurahan Cilincing dan Kalibaru, serta Hak Pakai Taman Margasatwa Ragunan.

Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Pj. Gubernur Heru juga menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Heru mendukung Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset-aset Pemprov DKI, demi mencegah penyalahgunaan tanah.

Sedangkan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menjelaskan, penyerahan 162 sertifi-

kat aset Pemprov DKI merupakan bagian dari perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memitigasi penyalahgunaan tanah Pemprov DKI Jakarta. "Kami akan terus bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk menyelesaikan aset-aset yang belum disertifikatkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Wartomo mengungkapkan, saat ini tanah yang telah terdaftar di Jakarta mencapai 1.767.824 bidang, atau 94,73% dari estimasi sejumlah 1.866.095 bidang. "Penandatanganan ini merupakan kesepakatan serta sinergi untuk mempercepat pendaftaran dan penanganan permasalahan pertanahan, khususnya aset di DKI Jakarta," jelasnya.

Kota Lengkap Bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan tersebut, Kementerian ATR/BPN pun mendeklarasikan Kota Administrasi Ja-

karta Pusat sebagai Kota Lengkap. "Apresiasi saya terkait deklarasi Kota Lengkap sebagai bentuk pemberian kepastian hukum bagi masyarakat atas sebidang tanah yang telah terpetakan dan terdaftar secara akurat," kata Heru.

Kota Lengkap merupakan sebuah kota yang sudah berhasil memetakan seluruh bidang tanahnya disertai validitas do-

kumen spasial maupun yuridisnya. Dengan demikian, Pj. Gubernur Heru mengharapkan, tidak ada lagi permasalahan bidang tanah yang tumpang tindih di Jakarta Pusat, yang akan diikuti wilayah-wilayah lain di Jakarta.

Karena itu, ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mengamankan, mengelola, serta memanfaatkan aset den-

gan lebih baik. "Pastikan juga pendaftaran dan pendataan tanah di DKI Jakarta dapat seluruhnya terpetakan dengan akurat," tambah Heru.

Jakarta Pusat merupakan kota ketujuh di Indonesia yang dideklarasikan sebagai Kota Lengkap. Dengan memiliki semua hak atas tanah, diharapkan tidak ada lagi sengketa tanah, mafia tanah, atau sertifikat tanah yang tumpang tindih.

"Ada pertambahan nilai ekonomi. Dengan sertifikat, maka hak atas tanah nilainya tinggi. Ini sudah bisa mengangkat perekonomian masyarakat untuk kegiatan-kegiatan ekonomi," terang Hadi.

Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Wartomo, deklarasi Kota Lengkap merupakan status untuk kota yang bidang tanahnya telah dapat terpetakan seratus persen. "Diawali oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang seluruh bidang tanahnya sudah terdaftar, terpetakan sejumlah 192.077 bidang," ungkapnya.

Dalam waktu dekat, Kota Lengkap lainnya akan menyusul di DKI Jakarta, yaitu Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Hingga akhir 2023, Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diharapkan bakal menyusul pula. "Sehingga, sampai tahun 2023 ini, seluruh kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta dinyatakan sebagai Kota Lengkap," lanjut Wartono.

Setelah tidak menjadi ibu kota lagi pada 2024, Jakarta akan bertransformasi menjadi Kota Global dalam jaringan ekonomi dunia. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus mengelola seluruh asetnya dengan baik, untuk meningkatkan pendapatan daerah demi menunjang pembangunan kota yang berkelanjutan.

Sukses Jakarta untuk Indonesia.